

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas Di Desa Cimekar.....	6
Tabel 1.2 Kegiatan/Program Bidang Kedisabilitas.....	7
Tabel 1.3 Data Disabilitas Di Desa Cimekar Berdasarkan Jumlah Penerima Bansos...	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.3 Batas wilayah.....	36
Tabel 3.4 Penggunaan Lahan.....	36
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk.....	37
Tabel 3.6 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Hasil Observasi.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas Desa Cimekar.....	6
Gambar 1.2 Data Penyandang Disabilitas Desa Cimekar Berdasarkan Kategori Usia.....	7
Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Cimekar.....	35
Gambar 4.1 Word Cloud.....	40
Gambar 4.2 Hierarchy Chart.....	41
Gambar 4.3 Project Map.....	42
Gambar 4.4 Program IKADK.....	45
Gambar 4.5 Coding By Item Produktivitas.....	50
Gambar 4.6 Cara PSM Mengetahui Kebutuhan Penyandang Disabilitas.....	53
Gambar 4.7 Coding By Item Responsivitas.....	57
Gambar 4.8 Coding By Item Responsibilitas.....	67
Gambar 4.9 Coding By Item Akuntabilitas.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan terorganisir yang memiliki tujuan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan dasar seseorang maupun masyarakat (Husna, 2014). Pada konteks ini, merujuk pada kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta dalam rangka mencegah, mengatasi atau berkontribusi dalam memberikan solusi dari suatu masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, serta masyarakat.

Pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial tentu sangat penting untuk dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, telah banyak menjelaskan terkait pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat. Menurut Maulana W. Khan dalam (Husna, 2014) Al-Qur'an telah mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial pada segala aspek kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia telah diperintahkan untuk saling menolong.

Sebagaimana telah diperintahkan Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang mengajarkan bahwa sikap saling menolong terhadap sesama sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ayat tersebut menegaskan bahwa sikap saling menolong adalah membantu dalam kebaikan serta ketaqwaan. Terlebih bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang

lain. Tolong menolong merupakan kunci terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut perlu diimplementasikan dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai isu terkait kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterlantaran, kemiskinan, kesusilaan, hingga kedisabilitasan. Kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia terutama bagi kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*) serta kelompok rentan (*vulnerable group*) (Engkus, 2019). Salah satu bagian dari kelompok tersebut adalah para penyandang disabilitas. Di mana dalam hal ini, berbagai cara dan pelayanan dilakukan agar kualitas hidup penyandang disabilitas dapat meningkat sehingga dapat berdaya dan terpenuhi kebutuhan dasarnya (Pertiwi, 2020).

Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam (Santoso & Apsari, 2017) penyandang disabilitas ialah individu yang mengalami keterbatasan baik secara intelektual, mental, fisik, ataupun sensorik dalam jangka panjang, di mana hal tersebut menjadi hambatan serta mengekang partisipasi para penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Anggapan publik terkait disabilitas dan penyandang disabilitas masih menjadi suatu masalah. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas ialah salah satu bagian dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seringkali mengalami kemiskinan, ketersisihan, diskriminasi, dan keterlantaran.

Menurut Couser dan Rothman dalam (Widinarsih, 2019) anggapan negatif terkait disabilitas bersumber dari pola pikir yang didominasi oleh konsep normalitas di mana masyarakat menganggap bahwa orang yang memiliki penampilan atau tubuh yang ‘berbeda’ dari mayoritas individu, akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima sebagai bagian dari komunitas.

Keadaan tersebut menjadikan para penyandang disabilitas sebagai seseorang yang kurang berdaya dalam menjalani kehidupan sosial. Keadaan lain penyandang disabilitas juga masih cukup memprihatinkan, di mana mayoritas dari mereka masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Isu kemiskinan dan disabilitas menjadi dua hal yang sulit dipisahkan, seperti seorang ibu dari kalangan yang kurang mampu tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya ketika hamil yang menyebabkan kekurangan gizi sehingga menyebabkan anak menjadi disabilitas (Cahyono, 2017).

Islam telah mengajarkan konsep kesetaraan bagi umat manusia di mana Allah melarang untuk mencela dan membeda-bedakan status sosial seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling memahami dan mengenal serta sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa.

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah mendapat tempat yang layak dalam agama Islam dan harus diperlakukan setara serta diterima dengan penuh ketulusan dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang

disabilitas bukan merupakan kelompok yang patut diperlakukan secara diskriminatif apalagi diberi stigma negatif (Rahmi, 2021).

Berdasarkan data berjalan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas mencapai 5% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 22,5 juta jiwa (Kemensos, 2020). Saat ini data penyandang disabilitas di Indonesia masih kurang akurat dan perlu dibenahi. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang ada, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah di tingkat kementerian hingga tingkat terkecil yakni desa.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya perwujudan pembangunan yakni meningkatkan kualitas hidup sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat (Sakti et al., 2021). Selain itu juga karena pemerintah desa adalah elemen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dari itu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial seperti disabilitas perlu dilakukan dari tingkat desa.

Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat desa dalam hal ini salah satunya adalah disabilitas yaitu melalui kebijakan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagaimana telah diubah menjadi Permensos No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

PSM ialah seseorang yang merupakan relawan dan memiliki jiwa pengabdian pada bidang sosial kemanusiaan sebagai sumber daya manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial serta berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kemensos RI, 2017).

PSM menjadi salah satu ujung tombak dalam hal pemberian pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang memiliki wilayah kerja pada tingkat kelurahan/desa. PSM berperan sebagai penggerak dalam melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat akar rumput di wilayah pedesaan dan bertugas untuk memberikan bimbingan sosial/penyuluhan, menggerakkan, dan mendampingi serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kemensos RI, 2017).

Pemerintah Desa Cimekar telah membentuk PSM sebagai komitmen untuk berupaya membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial. PSM Desa Cimekar beranggotakan sembilan orang diisi oleh mereka yang memiliki jiwa sosial dan kesukarelawanan yang tinggi dan terdiri dari tiga bidang yaitu kedisabilitas, keterlantaran, serta penanggulangan bencana.

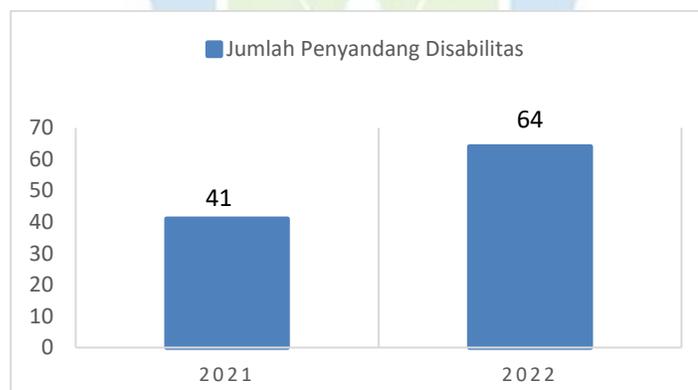
Adanya bidang kedisabilitas menunjukkan bahwa PSM Desa Cimekar berupaya untuk membantu memberikan pendampingan, pengarahan, hingga menggerakkan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas sebagai upaya penanganan masalah sosial penyandang disabilitas. Data pada tahun 2021-2022 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Desa Cimekar sebagai berikut:

Tabel 1. 1**Data Jumlah Penyandang Disabilitas Desa Cimekar**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	41
2.	2022	64

Sumber: PSM Desa Cimekar, Diolah Peneliti (2023)

Dari tabel di atas, apabila digambarkan dalam bentuk grafik dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1**Data Jumlah Penyandang Disabilitas Desa Cimekar**

Sumber: PSM Desa Cimekar, Diolah Peneliti (2023)

Mengacu pada data di atas, jumlah penyandang disabilitas di Desa Cimekar mengalami kenaikan yang signifikan di mana pada tahun 2021 berjumlah 41 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 64 orang,. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelahiran dan juga belum terdatanya semua penyandang disabilitas di tahun 2021. Saat ini dalam upaya menangani masalah sosial penyandang disabilitas, bidang kedisabilitas PSM Desa Cimekar menjalankan dua kegiatan/program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2
Kegiatan/Program Bidang Kedisabilitas

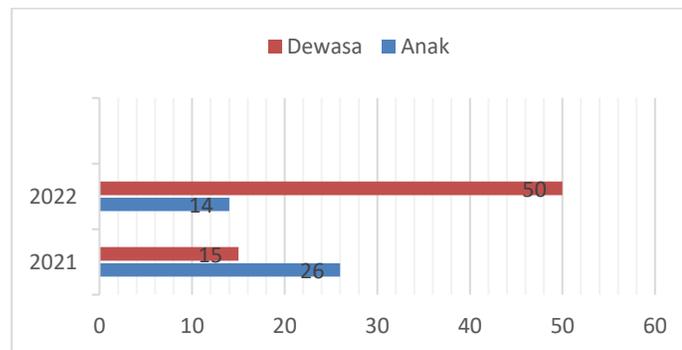
No.	Kegiatan/Prgram
1.	Membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos)
2.	Pembinaan organisasi Ikatan Keluarga Anak Dengan Kedisabilitas (IKADK)

Sumber: PSM Desa Cimekar, Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PSM Desa Cimekar memiliki dua kegiatan yaitu membantu menyalurkan bansos serta melakukan pembinaan organisasi IKADK. Dalam organisasi tersebut terdapat satu program yaitu penguatan spiritual orang tua penyandang disabilitas melalui pengajian rutin bulanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PSM Desa Cimekar kurang produktif dalam upaya penanganan masalah sosial penyandang disabilitas, karena belum terdapat inovasi kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas di Desa Cimekar dapat dikategorikan sesuai dengan usianya sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2

Data Penyandang Disabilitas Desa Cimekar Berdasarkan Kategori Usia



Sumber: PSM Desa Cimekar, Diolah Peneliti (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penyandang disabilitas di desa Cimekar didominasi oleh kategori usia anak. Akan tetapi, pada tahun 2022 didominasi oleh kategori usia dewasa karena penyandang disabilitas di Desa Cimekar mulai beranjak menuju usia dewasa. Dalam keadaan normal, pada usia dewasa seseorang akan menjadi lebih produktif dalam bekerja atau menghasilkan sesuatu. Akan tetapi, saat ini PSM Desa Cimekar belum dapat menyediakan wadah pengembangan potensi bagi penyandang disabilitas yang beranjak dewasa.

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan pekerjaan, sehingga mereka perlu didampingi, dibimbing, dan digerakkan secara mandiri agar mampu memenuhi kebutuhannya. Dari jumlah pada diagram di atas, sebaran pada setiap rukun warga (RW) tentu berbeda, sebagaimana **data terlampir**.

Berdasarkan data tersebut, belum semua penyandang disabilitas di Desa Cimekar dapat terdata. Masih terdapat beberapa RW yang tidak memiliki data jumlah penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan ketika PSM terjun ke lapangan, keluarga penyandang disabilitas tidak dapat ditemui di rumah. Selain itu belum semua keluarga dapat terbuka terkait kondisi kedisabilitasannya yang dialami oleh anggota keluarganya.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi PSM untuk merangkul keluarga penyandang disabilitas agar mereka dapat terbuka dengan kondisi kedisabilitasannya salah satu anggota keluarganya. Kemudian, penyandang disabilitas di Desa Cimekar tidak bisa sepenuhnya mengharapkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah

pusat/daerah. Karena pada saat ini hanya sedikit yang menerimanya, sebagaimana data di bawah ini:

Tabel 1. 2
Data Disabilitas Desa Cimekar Berdasarkan Jumlah Penerima Bansos

No.	Kategori	Target	Realisasi Bantuan	Persentase
1.	Disabilitas Anak	14	10	71%
2.	Disabilitas Dewasa	50	5	10%
Total		64	15	23,4%

Sumber: PSM Desa Cimekar Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa hingga tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Desa Cimekar yang belum mendapatkan Bansos dari pemerintah pusat/daerah dapat dikatakan masih banyak. Hal tersebut perlu direspon oleh Pemerintah Desa Cimekar dengan memberikan bantuan dan pembinaan melalui PSM agar penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri tanpa harus mengharapkan Bansos dari pemerintah pusat/daerah.

Bantuan yang diberikan tidak harus dalam bentuk materi, melainkan pendampingan, perhatian, rasa aman, hingga motivasi hidup pun dapat menjadi kebutuhan individu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (Andriana, 2017). Dengan hadirnya PSM diharapkan dapat memberikan bimbingan sosial/penyuluhan, mendampingi, dan menggerakkan para penyandang untuk berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa fenomena meliputi:

Produktivitas, berdasarkan laporan tahunan PSM Desa Cimekar, saat ini upaya penanganan masalah sosial penyandang disabilitas dapat dikatakan kurang produktif. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya program bagi para penyandang disabilitas. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 1 Permensos No. 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat telah mengamanatkan bahwa organisasi PSM harus memiliki program kerja.

Responsivitas, berdasarkan data rekapitulasi penyandang disabilitas, terdapat peningkatan yang signifikan jumlah penyandang disabilitas di Desa Cimekar. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini penyandang disabilitas di Desa Cimekar didominasi oleh kategori usia dewasa. Kemudian persentase penyandang disabilitas yang telah menerima Bansos dari pemerintah hanya 23,4% dari target.

Hal tersebut menunjukkan bahwa PSM perlu melakukan inovasi dalam rangka memberdayakan para penyandang disabilitas yang telah memasuki usia dewasa serta menggerakkan para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi PSM dalam pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Permensos No. 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat menyebutkan bahwa fungsi PSM adalah sebagai inisiator yaitu mengambil inisiatif dan inovasi dalam rangka menangani masalah kesejahteraan sosial serta sebagai dinamisor yaitu menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

Responsibilitas, berkaitan dengan tanggungjawab PSM dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, PSM Desa Cimekar belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai inisiator dan dinamisator. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya inovasi serta PSM belum dapat memberdayakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka mengetahui kurang maksimalnya PSM Desa Cimekar menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas sesuai dengan Permensos No. 10 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, dengan judul **Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial Penyandang Disabilitas**. penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi publik menurut (Sinambela, 2012) yang berpedoman terhadap empat parameter yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, menunjukkan bahwa:

1. Adanya kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah penyandang disabilitas di Desa Cimekar, namun saat ini masih minim program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Desa Cimekar;
2. Penyandang disabilitas di Desa Cimekar kini didominasi oleh usia dewasa, akan tetapi PSM belum dapat membentuk wadah bagi pengembangan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang beranjak dewasa;

3. Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima Bansos dari pemerintah hanya 23,4% dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas, maka dari itu PSM perlu menggerakkan para penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana produktivitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas?
2. Bagaimana responsivitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas?
3. Bagaimana responsibilitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas?
4. Bagaimana akuntabilitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui produktivitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas;
2. Mengetahui responsivitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas;

3. Mengetahui responsibilitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas;
4. Mengetahui akuntabilitas PSM Desa Cimekar dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan pengetahuan mengenai kinerja PSM dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas.

1.5.2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi media yang bermanfaat dalam implementasi pengetahuan terkait kinerja PSM dalam penanganan masalah sosial penyandang disabilitas. Sedangkan bagi Pemerintah Desa Cimekar penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penanganan masalah sosial penyandang disabilitas.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian diperlukan sebuah teori yang mendukung dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti sehingga kebenarannya tidak diragukan. Dalam penelitian ini terdiri dari: *grand theory*, *middle theory*, serta *applied theory* yang meliputi:

Pertama, *Grand Theory*, teori yang digunakan yaitu administrasi publik menurut Pfiffner dan Presthus dalam (Syafiie, 2006) yang mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut:

1. Administrasi publik terdiri atas implementasi kebijaksanaan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat diartikan sebagai kerjasama berbagai usaha baik perorangan maupun kelompok untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah yang meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, serta berbagai teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sekumpulan orang.

Kedua, *Middle Theory*, teori yang digunakan yaitu kinerja. Pada dasarnya konsep kinerja dapat ditinjau dari dua aspek, yakni kinerja pegawai (individu) yaitu hasil kerja perseorangan dalam sebuah organisasi dan kinerja organisasi yakni keseluruhan hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi.

Menurut Prawirosentono dalam (Umam, 2019) yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai seseorang maupun sekelompok orang pada suatu organisasi, berdasar pada wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, secara legal, tidak ada pelanggaran hukum, serta sesuai dengan moral dan etika.

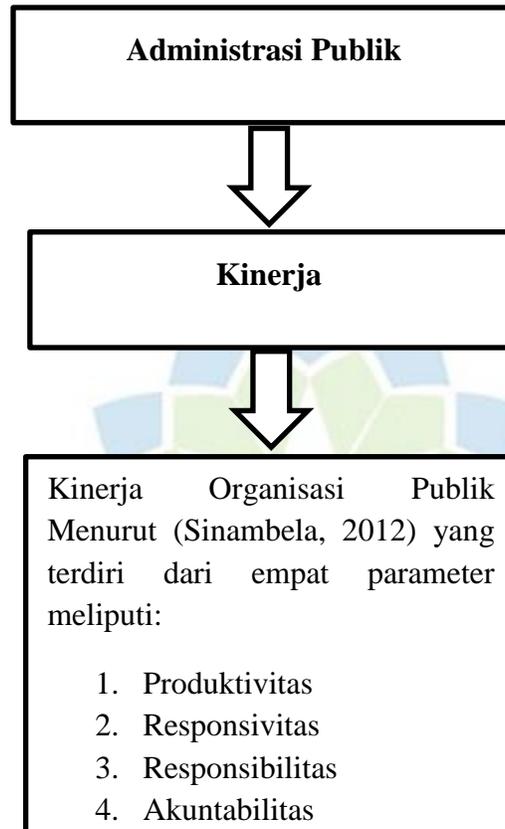
Ketiga, *Applied Theory*, teori yang digunakan yaitu teori kinerja organisasi publik. Kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan tinggi pula kinerja organisasi. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya yang diatur melalui undang-undang.

menurut (Sinambela, 2012) yang terdiri dari empat parameter meliputi:

1. Produktivitas merupakan keterkaitan antara *input* dengan *output*.
2. Responsivitas merupakan ketanggapan organisasi publik terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan, keluhan, permasalahan, serta aspirasi dari masyarakat.
3. Responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Responsibilitas berkenaan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima.
4. Dalam artian yang luas akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) terhadap pemberi amanah (*principal*) dalam memberikan laporan, pertanggungjawaban, serta mengungkap segala kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

1.7. Proposisi

Upaya penanganan masalah sosial penyandang disabilitas di Desa Cimekar akan berhasil jika didukung oleh beberapa faktor meliputi produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.